



## Perencanaan Dakwah Partai Politik Islam

Sahabat Ujang<sup>1\*</sup>, Zaenal Mukarom<sup>2</sup>, & Dewi Sa'diah<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Jurusan Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi,  
UIN Sunan Gunung Djati, Bandung

<sup>2</sup>Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi,  
UIN Sunan Gunung Djati, Bandung

\*Email: [sahabat.ujang@student.uinsgd.ac.id](mailto:sahabat.ujang@student.uinsgd.ac.id)

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perencanaan partai PKS sebagai organisasi politik dalam mengusung Islam sebagai orientasi politik, perencanaan PKS sebagai organisasi dakwah dalam melakukan *amar ma'ruf nahyi munkar*, dan perencanaan PKS sebagai organisasi kader dalam menghasilkan calon pemimpin untuk umat dan bangsa. Metode penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan perencanaan dakwah partai PKS telah sesuai menurut pakar manajemen, mulai dari kejelasan program, tujuan serta strategi yang telah ditentukan. Program sekolah kepemimpinan partai, training orientasi partai, rapat kerja pengurus, gerakan memakmurkan masjid, buka puasa bersama, merupakan bagian dari perencanaan yang telah dibuat oleh partai PKS sebagai organisasi politik, organisasi dakwah, dan organisasi kader.

**Kata Kunci :** Perencanaan Dakwah; Partai; Politik Islam.

### ABSTRACT

*This study aims to find out PKS party planning as a political organization in carrying Islam as a political orientation, PKS planning as a da'wah organization in doing amar ma'ruf nahyi munkar, and planning of PKS as cadre organization in generating prospective leaders for people and nation. The research method using descriptive qualitative. The results showed that PKS Party mission planning has been appropriate according to management experts, ranging from clarity of programs, objectives and strategies that have been determined. Party leadership school programs, party orientation training, board meetings, mosque welfare movements, breaking fast together, are part of the planning that has been created by the PKS party as a political organization, da'wah organization, and cadre organization.*

**Keywords:** *Da'wah Planning; Party; Islamic Politics.*

### PENDAHULUAN

Pada dasarnya kemampuan manusia itu terbatas (fisik, pengetahuan, waktu dan perhatian) sedangkan kebutuhannya tidak terbatas. Usaha untuk memenuhi kebutuhan dan terbatasnya kemampuan dalam melakukan pekerjaan mendorong manusia membagi pekerjaan, tugas dan tanggung jawab. Dengan adanya

pembagian kerja, tugas dan tanggung jawab ini, maka terbentuklah kerja sama dan keterikatan formal dalam suatu organisasi atau lembaga. Dalam organisasi ini maka pekerjaan yang berat dan sulit akan dapat diselesaikan dengan baik serta tujuan yang di inginkan tercapai (Hasibuan, 2011: 3).

Perencanaan (*planning*) merupakan *starting point* dari aktifitas manajerial. Bagaimanapun sempurnanya suatu aktifitas manajemen tetap membutuhkan sebuah perencanaan, karena perencanaan merupakan langkah awal bagi sebuah kegiatan dalam bentuk memikirkan hal-hal yang terkait agar memperoleh hasil yang optimal. Perencanaan adalah memilih dan menghubungkan fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa depan dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan (Terry, 2011: 92).

Partai politik adalah salah satu organisasi atau lembaga yang tidak terlepas dari proses perencanaan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkannya. Partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan untuk merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idiil maupun materiil (Budiarjo, 1991:161).

Penelitian ini dilakukan di DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Provinsi Jawa Barat, yang berada di Jl. Soekarno Hatta No. 538 A, Sekejati Buahbatu Kota Bandung Jawa Barat. Alasannya adalah bahwa problem dakwah hari ini bukan hanya saja atas faktor masyarakat, akan tetapi perencanaan yang tidak maksimal sehingga keberhasilan dakwah itu sendiri sedikit harapannya, juga menjadikan lembaga-lembaga atau partai-partai Islam sebagai sarana untuk membangun perencanaan dakwah melalui persatuan dan kesatuan yang dicita-citakannya, melalui hubungan sosial kelembagaan dan kemasyarakatan secara bersama-sama untuk mewujudkan dakwah yang lebih sistematis dan integral serta tidak terpaku dalam kegiatan yang bersifat formalistik saja. Esensi dakwah merupakan hal yang terpenting dari kegiatan dakwah itu sendiri, sehingga dapat dipahami serta di implementasikan oleh masyarakat umum pada umumnya dan umat Islam pada khususnya.

Partai Keadilan Sejahtera atau yang sering kali disebut dengan partai PKS merupakan salah satu partai politik yang ada di Indonesia. Partai keadilan sejahtera (PKS) merupakan partai lanjutan dari partai keadilan (PK) yang di dirikan pada tanggal 20 Juli 1998 di Jakarta. Partai keadilan (PK) kemudian berganti nama menjadi partai keadilan sejahtera (PKS) pada tanggal 20 April 2002 (Alawi, 2013: 14). Partai PKS sebagai organisasi politik, tentu mempunyai strategi perencanaan dalam mengembangkan partai untuk bersaing dengan partai-partai besar lainnya seperti partai demokrasi Indonesia perjuangan (PDIP), partai Demokrat, partai golongan karya (Golkar) dan partai lainnya pada saat pemilihan umum (Pemilu) yang diselenggarakan oleh komisi pemilihan umum (KPU) lima tahun sekali.

Partai keadilan sejahtera (PKS) merupakan Partai yang berasaskan Islam

(AD PKS Bab 1 Pasal 2 tentang Asas), sehingga dalam peraktiknya partai keadilan sejatera (PKS) tidak hanya sebagai organisasi atau partai politik saja, akan tetapi juga sebagai organisasi dakwah. Dakwah merupakan kegiatan yang bersifat menyeru, mengajak dan memanggil orang untuk beriman dan taat kepada *Allah Subhaanahu wa ta'ala* sesuai dengan garis aqidah, syari'at dan akhlak *Islam*. Dakwah mengandung arti sebagai suatu kegiatan ajakan, baik dalam bentuk tulisan, tingkah laku, dan sebagainya, yang dilakukan secara sadar serta berencana dalam usaha mempengaruhi orang lain, baik secara individual maupun kelompok, agar timbul dalam dirinya suatu pengertian, kesadaran, sikap penghayatan, serta pengamalan ajaran agama sebagai *message* (pesan) yang disampaikan kepadanya tanpa ada unsur paksaan (Arifin, 2015: 8-9).

Menyampaikan dakwah dan pendidikan Islamiyah kepada masyarakat merupakan salah satu tanggungjawab dan misi dari partai PKS, dasar ini dilakukan semata-mata untuk terwujudnya masyarakat yang berakhlak baik, cerdas, mandiri, bermartabat, bertanggungjawab, peduli sesama, sejahtera baik lahir maupun batin serta bahagia di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) lebih-lebih di akhirat kemudian.

Memiliki sumberdaya manusia (SDM) yang berkualitas produktif di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan cita-cita yang tinggi dari kader dan lembaga (PKS). Bagi partai PKS sumber daya manusia merupakan asset penting untuk mengelolah potensi kekayaan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara seperti Indonesia ini. Terlebih generasi muda, secara fisikal mereka masih kuat, dan tangkas untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Oleh karena itu yang dilakukan oleh partai PKS adalah melakukan pembinaan yang baik dan terdidik terhadap seluruh kader dan lapisan masyarakat Indonesia untuk sadar dan paham dalam berbagai bidang disiplin ilmu pengetahuan, baik teknologi maupun ilmu sosial lainnya. Dengan lahirnya kader yang memiliki akhlak yang baik, cerdas diberbagai ilmu pengetahuan maka munculah kepercayaan masyarakat untuk memilih dan menjadi wakil mereka dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Harapan inilah yang dicita-citakan partai PKS, membangun masyarakat juga membangun bangsanya menjadi lebih baik dari segala aspek, baik ekonomi maupun yang lainnya.

Dari latar belakang masalah tersebut dapat dirumuskan beberapa masalah dengan rumusan masalah: Bagaimana perencanaan yang dilakukan partai PKS sebagai organisasi politik dalam mengusung Islam sebagai orientasi politik? Bagaimana perencanaan yang dilakukan partai PKS sebagai organisasi dakwah dalam melaksanakan *amar ma'ruf nahi munkar*? dan bagaimana perencanaan yang dilakukan oleh partai PKS sebagai organisasi kader dalam menghasilkan calon pemimpin umat dan bangsa?

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, dengan menganalisis hasil pengumpulan data melalui observasi, studi dokumentasi, studi pustaka dan wawancara dengan pengurus atau kader partai keadilan sejahtera DPW provinsi Jawa Barat.

## LANDASAN TEORITIS

Perencanaan dakwah “hendaknya memperhatikan apa yang telah dikerjakan pada masa lalu untuk merencanakan sesuatu pada masa yang akan datang” (Munir dan Ilahi, 2006: 98). Konsep ini menjelaskan, bahwa perencanaan dakwah yang akan dilakukan harus sesuai dengan situasi dan kondisi pada masa lampau, saat ini, serta prediksi masa yang akan datang. Oleh karena itu, dalam aktifitas dakwah, perencanaan dakwah berfungsi menentukan langkah-langkah dan program dalam menentukan setiap sasaran dan tujuan, menentukan sarana prasarana atau media dakwah, serta personel da’i atau SDM yang akan diterjunkan. Perencanaan juga merupakan sebuah proses untuk mengkaji apa yang hendak dikerjakan dimasa yang akan datang. Perlu ditekankan bahwa perencanaan berbeda dengan perkiraan atau prediksi, karena sebuah prediksi itu hanya merupakan sebuah ramalan dimasa yang akan datang yang sifatnya tidak proaktif.

Perencanaan dakwah adalah “proses pemikiran dan pengambilan keputusan yang matang dan sistematis, mengenai tindakan-tindakan yang akan dilakukan pada masa yang akan datang dalam rangka menyelenggarakan dakwah” (Shaleh, 2006: 101).

Oleh karena itu dalam pelaksanaannya perencanaan dakwah yang baik harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

*Pertama*, Didasarkan pada sebuah keyakinan bahwa apa yang dilakukan adalah baik. Standar baik dalam Islam adalah yang sesuai dengan ajaran Alquran dan As-sunnah. *Kedua*, Dipastikan betul bahwa sesuatu yang dilakukan memiliki manfaat. Manfaat ini bukan sekedar untuk orang yang melakukan perencanaan, tetapi juga untuk orang lain, maka perlu memperhatikan asas maslahat untuk umat, terlebih dalam aktifitas dakwah. *Ketiga*, Didasarkan pada ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan apa yang dilakukan. Untuk merencanakan sebuah kegiatan dakwah, maka seorang da’i harus banyak mendengar, membaca dan memiliki ilmu pengetahuan yang luas sehingga dapat melakukan aktifitas dakwah berdasarkan kompetensi ilmunya. *Keempat*, Dilakukan studi banding (benchmark). Benchmark adalah melakukan studi terhadap praktik terbaik dari lembaga atau kegiatan dakwah yang sukses menjalankan aktifitasnya. *Kelima*, Diperkirakan dan dianalisis prosesnya, dan kelanjutan dari aktivitas yang akan dilaksanakan (Munir dan Ilahi, 2006: 99).

Konsep perencanaan telah Allah jelaskan didalam kitab Alquran surat Al-Hasyr ayat 18)

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan (Depag, 2002: 919).

Firman Allah Swt. di atas menganjurkan kepada orang-orang yang beriman, supaya memperhatikan apa yang akan diperbuatnya di hari esok. Dalam istilah manajemen, tindakan itu disebut dengan planning atau perencanaan. Perencanaan

merupakan fungsi yang menentukan rencana, strategi, program, kebijaksanaan, prosedur, peraturan, dan standar yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi (Komarudin, 1993: 287).

Jadi, jika pengertian perencanaan dihubungkan dengan pengertian dakwah, maka dapat diketahui bahwa perencanaan dakwah adalah suatu proses pemikiran atau usaha sadar dalam pengambilan keputusan untuk menetapkan kegiatan yang akan dilaksanakan dimasa yang akan datang dengan prosedur dan metode pelaksanaannya untuk mencapai tujuan dakwah.

Dari uraian diatas dapat diketahuai bahwa perencanaan merupakan fungsi dasar (fundamental) dalam manajemen, karena *organizing*, *staffing*, *directing*, dan *controlling* pun harus terlebih dahulu direncanakan. Perencanaan ini adalah dinamis, perencanaan ini ditunjukkan pada masa depan yang penuh dengan ketidakpastian, karena adanya perubahan kondisi dan situasi. Oleh karena itu, perlu alternatif-alternatif lain yang lahir dari sebuah perencanaan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada 20 Juli 1998 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berdiri dengan nama awal Partai Keadilan (disingkat PK) dalam sebuah konferensi pers di Aula Masjid Al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta Lahirnya partai keadilan (PK) pada tanggal 20 Juli 1998 dalam sebuah konferensi pers di aula masjid Al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta (Wiki Media, 2017).

Partai ini lahir dari aktivis gerakan dakwah kampus di Indonesia atau gerakan tarbiyah yang dirumuskan dan di dirikan oleh lima puluh dua orang tokoh. Presiden (ketua) pertama partai ini adalah Nurmahmudi Isma'il. Berdirinya partai ini tidak bisa lepas dari peristiwa besar yang terjadi pada orde baru, yaitu lengsernya Presiden Soeharto dari kepresidenan. Pristiwa mundurnya Soeharto dari kepresidenan republik Indonesi disambut dengan euforia politik bangsa Indonesia yang gegap gempita dan meluas diseluruh tanah air nusantara. Sejak tanggal 20 April 2002 partai keadilan resmi berubah nama menjadi partai keadilan sejahtera. Partai ini memiliki visi dan misi yang cukup menarik ditelinga masyarakat.

Visi partai PKS yaitu; "Menjadi partai pelopor dalam mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksudkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945". Misi partai PKS yaitu; "Menjadikan Partai sebagai sarana perwujudan masyarakat madani yang adil, sejahtera, dan bermartabat yang diridhai Allah subhanahu wa ta'ala, dalam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia". (AD PKS, 2013: 5).

Hasil penelitian ini menemukan jawaban dari tiga rumusan masalah penelitian yaitu; perencanaan partai PKS sebagai organisasi politik dalam mengusung Islam sebagai orientasi politik, perencanaan partai PKS sebagai organisasi dakwah dalam melakukan amar ma'ruf nahyi munkar, dan perencanaan partai PKS sebagai organisasi kader.

## **Perencanaan PKS sebagai Organisasi Politik dalam Mengusung Islam**

### sebagai Orientasi Politik

Lahirnya pemikiran oleh sejumlah aktivis dakwah kampus atau gerakan tarbiyah yang menginginkan berdirinya partai politik sebagai wadah persatuan umat Islam dan pengembangan nilai ke-Islaman dalam tatanan kehidupan masyarakat dan pemerintah menjadi dasar pemikiran dan perencanaan perjuangan Partai PKS dikancah politik. Nilai-nilai ke-Islaman menjadi pribadi pokok yang harus dimiliki oleh seorang kader, dan memperjuangkannya untuk kemaslahatan umat pada umumnya serta umat Islam pada khususnya. Oleh karena itu, lahirnya gagasan perencanaan partai PKS sebagai organisasi politik dalam mengusung Islam sebagai orientasi politik seperti yang dilakukan oleh pengurus dan kader DPW PKS Jawa Barat tidak lepas dari apa yang telah dikerjakan oleh kader Partai Keadilan (PK) atau Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dahulu.

Jika menengok sejarah bahwa politik tidak bisa dilepaskan dengan Islam begitu pun sebaliknya. Islamisasi melalui jalur politik dilakukan secara berkesinambungan antara penguasa dan pemerintahan. Setelah penguasa atau raja masuk Islam, hampir dapat dipastikan bahwa rakyatnya juga masuk Islam. Misalnya yang terjadi di Maluku dan Sulawesi. Hal itu terjadi karena masyarakat memiliki kepatuhan yang tinggi terhadap pemerintah, dan seorang raja akan menjadi panutan bahkan menjadi contoh bagi rakyatnya. Di Jawa proses perkaninan para wali dan juru dakwah dengan putri-putri keturunan kerajaan, membuat status dakwah dan penyebaran Islam mendapatkan perlindungan dan berkembang lebih cepat. Setelah raja dan rakyat memeluk Islam, kepentingan politik dilakukan dengan cara perluasan wilayah kerajaan, yang diikuti dengan penyebaran agama Islam. Misalnya Sultan Demak yang mengirimkan pasukan di bawah komandi Fatahillah untuk menguasai wilayah Jawa Barat dan menyebarkan Islam di wilayah tersebut (Bems, 2013).

Hal ini sesuai dengan konsep tentang teori perencanaan, yang menjelaskan bahwa “perencanaan dakwah hendaknya memperhatikan apa yang telah dikerjakan pada masa lalu untuk merencanakan sesuatu pada masa yang akan datang” (Munir & Ilahi, 2006: 98)

Sebagaimana yang dikatakan bapak Indra Kurniawan (staf DSW PKS Jawa Barat) bahwa untuk mengembangkan misi dakwah partai PKS dalam kacamata politik yaitu harus dilakukan rapat kerja pengurus atau kader, dan ditetapkannya tujuan (*establishing objectives*) yang ingin dicapai dari perencanaan dakwah tersebut. Tujuan perencanaan dakwah itu sendiri meliputi:

*Pertama*, tujuan primer (tujuan akhir) yaitu suatu kegiatan bersama untuk mengaktualisasikan nilai-nilai ajaran agama Islam dalam bentuk *amar ma'ruf nahi munkar* dan amal shaleh dalam kehidupan sehari-hari, baik secara pribadi kader, keluarga, dan masyarakat, sehingga mewujudkan umat yang baik, sejahtera lahir dan batin serta bahagia didunia terlebih diakhirat. *Kedua*, tujuan sekunder (tujuan perantara) yaitu usaha bersama dalam menanamkan keyakinan, menumbuhkan sikap dan membina perilaku umat dengan cara lisan, dan perbuatan menurut nilai-nilai dan ajaran Islam untuk dihayati dan diamalkan dalam kehidupan, sehingga

menjadi umat yang baik sejahtera lahir dan batin, serta bahagia didunia terlebih diakhirat (wawancara dengan bapak Indra pada tanggal 7 Juni 2017 disekretariat DPW PKS Jawa Barat).

Rapat kerja pengurus atau kader juga akan menentukan penepatan dan penafsiran kebijaksanaan (*establishing and interpreting policies*). Hal ini dilakukan upaya untuk menjamin keseragaman dan keselarasan pemikiran dan tindakan kader partai PKS dalam menguasai masalah-masalah dan situasi pokok politik atau keumatan dan kebangsaan, seorang pimpinan partai menetapkan, menafsirkan kebijaksanaan-kebijaksanaan. Suatu kebijaksanaan adalah keputusan yang senantiasa berlaku untuk masalah-masalah yang timbul berulang-ulang dalam organisasi. Rapat kerja pengurus juga merupakan proses perencanaan yang dibuat untuk mempermudah langkah organisasi, khususnya untuk mencairkan nilai-nilai keislaman dalam politik, sehingga dalam pelaksanaan politik selalu disertai dengan nilai-nilai ajaran agama yang menjadi ideologi partai PKS.

Penyebaran nilai-nilai ajaran Islam diwilayah politik sejatinya juga menjadi perhatian penting bagi partai-partai Islam lainnya. Seperti partai persatuan pembangunan, partai bulan bintang, partai kebangkitan bangsa dan seterusnya. Partai-partai Islam ini sejatinya bersatu untuk bekerjasama untuk kemajuan dan kejayaan Islam. Dalam pelaksanaan perencanaan yang telah ditentukan oleh kader partai PKS untuk mengembangkan atau mengusung nilai-nilai Islam diwilayah politik atau kebijakannya dalam parlemen atau birokrasi menjadi perhatian penting bagi para kader PKS. Misalnya mengusung dan mendukung peraturan yang dibakukan pada undang-undang tentang pengelolaan dana zakat, penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, peraturan tentang larangan pornografi dan pornoaksi, semua ini merupakan proses dari perencanaan partai PKS sebagai organisasi politik dalam mengusung Islam sebagai orientasi politik dan menjadi tujuan utama partai untuk mengalirkan nilai-nilai ajaran Islam ditengah-tengah masyarakat, baik sebagai warga negara Indonesia pada umumnya maupun umat Islam pada khususnya.

Upaya diatas merupakan komitmen pengurus dan kader Partai PKS yang berdiri sebagai organisasi politik dalam mengusung Islam sebagai orientasi politik, Islam yang dijadikan sebagai ideologi partai, dan Islam menjadi tujuan ahir dari perjuangan partai.

### **Perencanaan Partai PKS sebagai Organisasi Dakwah dalam Melakukan Amar Ma'ruf Nahyi Munkar**

Partai PKS lebih dikenal dengan istilah organisasi dakwah, pendapat tersebut tidak bisa dilepaskan dari tokoh-tokoh pendiri partai ini yang merupakan sekelompok aktivis dakwah atau gerakan tarbiyah. Dakwah merupakan usaha sadar mentransformasikan masyarakat untuk terus-menerus kearah yang lebih baik lagi dengan menekankan tiga komitmen (komitmen moral, komitmen spiritual dan komitmen aktivitas).

Menurut Abdul Aziz, Secara bahasa, dakwah bisa berarti: (1) memanggil; (2) menyeru; (3) menegaskan atau membela sesuatu; (4) perbuatan atau perkataan

untuk menarik manusia kepada sesuatu; serta (5) memohon dan meminta. Sedangkan secara istilah dakwah yaitu pendorong (motivasi) manusia untuk melakukan kebaikan dan mengikuti petunjuk serta menyuruh kepada mereka berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan munkar agar memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat (dalam Tata Sukayat, 2015: 7).

Menurut bapak Abdul Muiz (ketua bidang pembangunan keumatan dan dakwah DPW PKS Jawa Barat) partai politik sebagai media dakwah merupakan politik yang ditarik ke ranah aspek agama Islam dalam ranah amanah yang didasari untuk membangun kemaslahatan seluruh penduduk yang diajak kerjasamanya dalam mempraktekkan kebaikan. Politik tidak semata untuk mencari kepentingan pribadi atau kelompok semata, akan tetapi politik sebagai alat untuk mengimplementasikan nilai-nilai Islam dengan cara membangun, mengatur dan membimbing segala aktivitasnya tidak keluar dari syariat Islam. Politik sebagai media dakwah yang jelas bukan politik yang sekuler, tapi politik sebagai komitmen untuk menjunjung tinggi Islam. Disinilah letak pentingnya marketing politik, untuk menghasilkan marketing politik yang baik maka peran perencanaan sangatlah dibutuhkan. Marketing politik dimaksudkan sebagai kegiatan penyebarluasan informasi tentang kandidat, partai, dan program kerja kepada khakayak luas dengan tujuan mengubah wawasan, pengetahuan, sikap dan perilaku calon pemilih (Cangara, 2009:227).

Ciri khas politik sebagai media dakwah antara lain, menegakkan kejujuran, keterbukaan, keberanian mengemukakan kebenaran dan menyalahkan yang salah (bathil) serta penuh tanggung jawab (Syam Firdaus: 2003). Dalam berpolitik selalu berfungsi bagi tujuan nilai-nilai Islam. Jadi cara berpolitiknya tidak boleh lepas dari nilai-nilai ke-Islaman.

Sebagai organisasi dakwah perencanaan partai PKS dalam pelaksanaannya mengembangkan nilai-nilai ke-Islaman atau melakukan *amar ma'ruf nabi munkar* baik dalam tatanan kehidupan masyarakat maupun pemerintahan didasarkan pada empat orbit dakwah partai PKS. "Dakwah dalam usaha penanaman nilai-nilai ke-Islaman yang dilakukan DPW PKS Jawa Barat berdasarkan empat orbit dakwah partai PKS, antara lain; (Mihwar At-Tandzimi), (Mihwar Sya'bi), (Mihwar Muasasi), dan (Mihwar Daulah)" (wawancara ketua bidang pembangunan keumatan dan dakwah, bapak Abdul Muiz, tanggal 12 Juni 2017 digedung DPRD Jawa Barat).

Pertama, Mihwar At-Tandzimi; Pada tahap ini fokus utama dakwah partai PKS adalah konsolidasi dan pembinaan kader. Tahap ini merupakan suatu keniscayaan dalam membangun kekuatan internal partai, karenanya kata kunci gerakan dakwah pada fase ini adalah pengokohan internal, baik dari segi infrastruktur maupun suprastruktur dakwah. Pekerjaan kaderisasi (tajnid) menjadi penekanan, karena itu prinsip yang sering dikemukakan adalah tarbiyah atau pembinaan bukanlah segalanya, tetapi segalanya dimulai dari tarbiyah. Kader bagi partai PKS merupakan asset yang paling terpenting untuk dibina dan di didik sehingga mempunyai kualitas pribadi yang baik dan dapat



membangun, karena itu partai PKS merupakan partai kader.

Kualitas kepribadian dan pengetahuan kader menjadi perhatian penting partai PKS, untuk mengembangkan misi dakwah diperlukan kader-kader profesional berdasarkan bidang ilmu pengetahuannya. Pembinaan kader ini dilakukan melalui halaqoh-halaqoh khusus, selain mengkaji juga mengevaluasi kepribadian dan kegiatan sehari-hari kader dalam ilmu dakwah disebut (Ad-Dakwah An-Nafsiyah), seperti perilaku atau akhlak, kegiatan tilawatil qur'an dan hubungan kader dengan masyarakat sekitar. Pada tahap ini kader partai PKS betul-betul dibina dan di didik menjadi kader yang berkarakter baik, bertanggungjawab serta bermental terus menerus untuk memperbaiki diri pribadi menjadi lebih baik lagi. Untuk membangun dan mengajak masyarakat pada sesuatu yang dikehendaki tentunya seseorang akan melihat sikap dan tingkah laku yang diperbuat oleh objek yang mengajak atau menyeru dalam kehidupan sehari-harinya. Inilah yang diinginkan oleh kader partai PKS, sebelum mengajak masyarakat mereka ingin terlebih dahulu memberikan contoh yang baik bagi masyarakat, rekan-rekan politik dan kepemimpinan yang bersih dari perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan masyarakat seperti tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme.

Kedua, Mihwar Sya'bi; Pada tahap ini aktivitas dakwah kader partai keadilan sejahtera (PKS) mulai mengalirkan energinya untuk kepentingan masyarakat secara umum melalui gerakan amar ma'ruf wa nahyi munkar, yakni layanan dalam berbagai bidang kehidupan melalui instrumen organisasi keumatan terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi rakyat dan berbagai kegiatan lainnya. Kata kunci dalam orbit dakwah partai PKS ini adalah pelayanan. Dalam orbit ini tak heran kalau rumah sakit-rumah sakit Islam bermunculan, sekolah-sekolah Islam terpadu dan Universitas Islam, BMT dan bank syariah, serta lembaga layanan umat lainnya berdiri. Sudah barang tentu ada banyak berkah dalam orbit ini, baik direncanakannya program keagamaan maupun munculnya lembaga-lembaga pelayanan. Mislanya; Berdirinya Rumah Keluar Indonesia (RKI), Rumah Keluarga Indonesia (RKI) adalah wadah yang disediakan oleh DPW PKS Jawa Barat untuk konsultasi masalah keluarga dan juga anak, langkah ini dibuat dalam rangka mengokohkan keluarga, konsultasi remaja, sanggar remaja, penitipan anak, dan lain-lain yang disediakan untuk masyarakat. Lembaga ini bertempat di sekretariat DPW PKS Jawa Barat, RKI hadir dalam rangka memberikan pelayanan keluarga dan pendampingan langsung masyarakat. Gerakan Memakmurkan Masjid (Gema Masjid), Berdirinya berbagai majlis taklim atau LSM dakwah dilingkungan kader PKS bermasyarakat sebagai wajah untuk berinteraksi merupakan upaya untuk memakmurkan masjid. Banyaknya dari kader partai PKS yang menjadi DKM dilingkungan sekitar tempat tinggalnya, sehingga sering aktif dikegiatan masjid dan dapat berinteraksi langsung dengan masyarakat, hal ini dapat mendorong masyarakat untuk shalat berjamaah dan terlibat dalam kegiatan PHBI dan majlis taklim . para kader partai juga berinovasi mengaplikasikan ilmu teknologi dimasjid seperti penggunaan proyektor saat kegiatan DKM.

Tujuan kegiatan ini adalah agar masyarakat secara mandiri dapat memakmurkan masjid tanpa didorong-dorong lagi oleh kader PKS. Diharapkan masyarakat akan terbiasa dan membutuhkan untuk selalu beribadah di masjid secara berjamaah.



Sumber: arsip DPW PKS Jawa Barat

Gambar 1. Majelis Ta'lim Kader PKS dengan Masyarakat

Selanjutnya pada fase dakwah ini partai PKS DPW Jawa Barat juga melaksanakan buka puasa bersama dan santunan yatim dan dhuafah. DPW PKS Jawa Barat menggelar buka puasa bersama antara pengurus dan masyarakat RW 12 Kelurahan Sekjati Kecamatan Buahbatu Kota Bandung. Acara ini dilaksanakan di kantor DPW PKS Jawa Barat Jalan Soekarno Hatta Kota Bandung, Rabu 21 Juni 2017. Buka puasa bersama ini mengundang seluruh pengurus DPW PKS Jabar, mulai dari Dewan Pertimbangan Wilayah, Dewan Syariah Wilayah, Dewan Pengurus Wilayah, Fraksi PKS DPRD Jawa Barat dan para staf. Dalam sambutannya Ahmad Syaikhul selaku ketua umum DPW PKS Jawa Barat periode 2015-2020 mengatakan “acara buka puasa ini dilaksanakan dalam rangka mempererat silaturahmi antara seluruh pengurus DPW PKS Jawa Barat dengan masyarakat sekitar”. Syaikhul juga meminta maaf acara buka puasa bersama tersebut belum bisa mengundang banyak masyarakat dikarenakan tempat atau ruangan kantor DPW PKS Jawa Barat yang terbatas.

Kegiatan buka puasa bersama ini tidak hanya dilakukan oleh DPW PKS Jawa Barat saja, melainkan seluruh DPD, DPC bahkan ditingkat Ranting (DPR) disetiap desa di Jawa Barat. Untuk DPW PKS selain mengadakan buka puasa bersama juga membagikan ta'jil gratis selama bulan suci Ramadhan serta pengadaan posko mudik di beberapa wilayah Jawa Barat. Posko mudik ini nantinya akan menyediakan berbagai layanan untuk pemudik yang hendak pulang kampung di halamannya masing-masing.



Sumber. Arsip DPW PKS Jawa Barat

Gambar 2. Santunan Ramadhan Yatim dan Dhuafah

Ketiga, Mihwar Muasasi; Pada tahap orbit dakwah ini dimana kader dakwah atau partai mulai masuk ke dalam lembaga publik, baik diparlemen, birokrasi maupun lembaga-lembaga profesi lainnya. Mereka berkontribusi dalam lembaga-lembaga tersebut dengan menampilkan integritas moral serta kualitas profesional dan kepakarannya. Kata kunci dalam Orbit dakwah ini adalah kepakaran. Misi utama kader dakwah naik secara vertikal (mobilitas vertikal) dan melakukan penetrasi ke dalam lembaga-lembaga publik ini adalah untuk mempengaruhi, menerjemahkan, atau merumuskan konsep dan nilai-nilai Islam ke dalam kebijakan-kebijakan publik yang dihasilkan lembaga-lembaga tersebut. Untuk menjalankan misi ini sudah barang tentu sekali lagi menuntut kepakaran kader. Dakwah dalam sektor organisasi publik menurut Abdul Muiz (wawancara tanggal 12 Juni 2017 dikantor DPRD Jawa Barat) dapat dibedakan menjadi dua, yakni: 1) Dakwah Parlemitter, Dakwah parlemitter merupakan perluasan medan dakwah, yakni dakwah dalam mimbar resmi negara untuk berjuang secara konstitusional bagi penerapan nilai-nilai Islam dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dakwah parlemen adalah salah satu bentuk amar ma'ruf nahyi munkar dalam mimbar demokrasi yang mempunyai fungsi kontrol atas pemerintah (hisbah) dalam rangka memperjuangkan nilai-nilai Islam. Dalam mimbar parlemen ini pula dapat diperlihatkan kepada masyarakat, bahwa Islam adalah agama yang sempurna (syamil) dan Islam adalah solusi. Karenanya dakwah parlemen menuntut fungsi; Legislasi (taqnin), Pengawasan (hisbah) dan Pernyataan publik (tabligh). 2) Dakwah Birokrasi, Dakwah birokrasi adalah dakwah dalam kancah eksekutif dalam upaya untuk menerjemahkan, mempengaruhi, menafsirkan dan melaksanakan agar kebijakan publik sesuai dengan nilai-nilai Islam demi melayani masyarakat dan dalam rangka mensejahterakan mereka. Program reformasi pemerintahan untuk menegakkan pemerintah yang bersih bebas dari virus KKN serta terjadinya mobilitas vertikal kader dakwah dalam birokrasi.

Pada orbit ini interaksi dengan publik mulai dilakukan secara institusional melalui organisasi politik dengan doktrin *al hisb huwal jama'ah al*

*jama'ah hiyal hizb* bukan secara individual atau parsial melalui wajah-wajah LSM. Sampai disini dapat dipahami jika kriteria utama dalam Orbit Lembaga adalah profesionalitas dalam bingkai ini, maka yang perlu diusung adalah kader dakwah yang memahami nilai-nilai Islam dan memiliki komitmen tinggi bagi perwujudannya, yang memiliki kredibilitas moral, kredibilitas sosial dan kredibilitas profesional. Kader yang bukan saja memiliki kredibilitas moral yang tinggi dalam menggusung perubahan serta mampu berinteraksi sosial secara harmonis di dalam lingkungannya, tetapi juga profesional di bidangnya. Pilar profesionalitas yang diperlukan untuk itu, yakni berkaitan dengan dimilikinya kompetensi (*core competence*), kacakapan manajerial, berpikir strategis sesuai dengan bingkai pengembangan potensi, dan berpikir terbuka (*open mind*).

Keempat, Mihwar Daulah; Orbit dakwah terakhir yang perlu dilalui adalah Orbit Negara (mihwar daulah), adalah Orbit dimana dakwah telah memasuki pengelolaan institusi negara secara penuh dan sekaligus merupakan perluasan dari Orbit Lembaga. Jika dalam orbit sebelumnya, interaksi dengan sektor negara dalam birokrasi dan lembaga negara lainnya (politik, legislatif, eksekutif dan lainnya) masih dilaksanakan secara individual dan parsial, maka dalam orbit dakwah ini interaksi dilakukan secara total.

Keempat orbit dakwah diatas merupakan perencanaan dan bentuk kegiatan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai organisasi dakwah dalam melakukan *amar ma'ruf nahi munkar*. Pada dasarnya keempat orbit dakwah tersebut saling berkaitan dan melengkapi dalam pelaksanaannya, mendakwahkan nilai-nilai ke-Islaman sebagai pengembangan agama merupakan orientasi partai PKS.

### **Perencanaan PKS sebagai Organisasi Kader dalam Menghasilkan Calon Pemimpin Umat dan Bangsa**

Kader bagi partai PKS merupakan *asset* terpenting yang harus dikelola dan dibina berdasarkan kemampuannya, agar dihasilkan kader-kader yang berkualitas secara pemikiran dan tindakan. Kaderisasi yang direncanakan partai PKS merupakan upaya menghasilkan calon pemimpin yang bertanggungjawab dan berjuang untuk umat dan bangsa.

Rekrutmen dan kaderisasi anggota partai PKS dilakukan secara terencana dan selektif. Hal ini dilakukan sebagai upaya atau usaha partai untuk mencetak dan menghasilkan kader yang berkualitas, professional serta bertanggungjawab atas keadilan dan kesejahteraan umat berdasarkan tuntunan ajaran agama Islam. Pola kaderisasi partai PKS dilakukan berdasarkan pedoman anggaran dasar dan pedoman rumah tangga partai PKS. Sesuai dengan bab IV (AD PKS) pasal 9 ayat 3 tentang keanggotaan, partai PKS terdiri dari anggota biasa dan anggota kehormatan. Setiap orang perseorangan yang berjasa terhadap partai dan mengajukan kepada partai diangkat dan ditetapkan menjadi anggota kehormatan.

Sedangkan anggota biasa terdiri; Pertama, Anggota Pendukung (anggota terdaftar dan anggota aktif), Kedua, Anggota Terbina (anggota pemula dan

anggota muda), Ketiga, Anggota Inti (anggota madya, anggota dewasa, anggota ahli, dan anggota purna). Rekrutmen dan kaderisasi anggota biasa dilakukan berdasarkan Bab IV pasal 10 tentang Rekrutmen dan kaderisasi Anggota Biasa dilaksanakan dengan sistem dan mekanisme sebagai berikut:

Pertama, Setiap orang yang secara sukarela mendaftarkan diri dan menyatakan persetujuannya terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai diangkat dan ditetapkan menjadi anggota pendukung. Kedua, Setiap Anggota Pendukung yang setia mengikuti kegiatan dan pelatihan yang diselenggarakan Partai diangkat dan ditetapkan menjadi Anggota Terbina. Ketiga, Setiap Anggota Terbina yang setia mengikuti pembinaan dan kaderisasi yang diselenggarakan Partai diangkat dan ditetapkan menjadi Anggota Inti. Setiap orang yang secara resmi telah mendaftarkan diri dan ditetapkannya sebagai Anggota Partai, maka anggota tersebut harus menjaga nama baik mengembangkan partai, patuh terhadap AD/ART serta pedoman-pedoman partai lainnya. Kualitas kader secara keilmuan yang terjamin dan memiliki kepribadian yang Islami merupakan tujuan dari kaderisasi partai PKS, oleh karena itu kaderisasi selain dilakukan oleh aktivis dakwah dikampus-kampus yang merekrut kader-kader muda, juga dilakukan dikalangan masyarakat umum sebagai kekuatan partai.

Selain pola kaderisasi diatas yang menjadi standar kaderisasi partai PKS memiliki program khusus yang harus di ikuti oleh kader-kader partai PKS. Program ini merupakan langkah partai PKS untuk menghasilkan calon-calon pemimpin untuk umat dan bangsa yang bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat yang adil, sejahtera dan bijaksana. Program ini diantaranya yaitu:

Pertama, Training Orientasi Partai (TOP); Training orientasi partai (TOP) merupakan kegiatan pelatihan dan pengenalan partai PKS kepada masyarakat dan juga kader partai agar mengetahui dengan sesungguhnya tentang jati diri partai dan perjuangannya dalam membangun umat dan bangsa. Kegiatan training orientasi partai (TOP) ini sebagaimana telah dilaksanakan oleh DPW PKS Jawa Barat pada hari Minggu, tanggal 29 Mei 2016 yang bertempat di aula DPW PKS Jawa Barat, Jl. Soekarno Hatta No. 538 A Bandung. Peserta kegiatan ini merupakan tokoh-tokoh masyarakat di Kota dan Kabupaten se-Jawa Barat, Pengurus DPD PKS se-Jawa Barat, dan Anggota Dewan dari fraksi PKS, baik yang di DPRD Jawa Barat maupun di DPR RI. Materi yang diberikan pada Training Orientasi Partai (TOP) ini terbagi menjadi dua bagian. Pertama, penguatan dasar kepartaian, termasuk di dalamnya Islam sebagai pedoman hidup. Kedua, mengenai mengenai jati diri partai. Training Orientasi Partai (TOP) yang dilasanakan oleh DPW PKS Jawa Barat ini menghadirkan dua pembicara utama, yaitu Presiden PKS Sohibul Iman dan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan.

Tujuan kegiatan ini menurut bapak Abdul Muiz (ketua bidang pembangunan keumatan dan dakwah DPW PKS Jawa Barat) merupakan usaha pengenalan dan rekrutmen partai kepada tokoh-tokoh masyarakat di Jawa Barat dan juga penguatan dasar perjuangan partai terhadap kader partai PKS untuk diperjuangkan berdsarkan nilai-nilai ketuhanan, serta bertanggungjawab atas

keadilan dan kesejahteraan masyarakat (wawancara dengan bapak Abdul Muiz, ketua bidang pembangunan keumatan dan dakwah, pada tanggal 12 Juni 2017 dikantor DPRD Jawa Barat).



Sumber. Arsip DPW PKS Jawa Barat

Gambar 3. Sambutan Ketua DPW PKS Jabar (Ahmad Syaikh) di Acara Training Orientasi Partai (TOP)

*Kedua*, Sekolah Kepemimpinan Partai (SKP); Sekolah Kepemimpinan Partai (SKP) merupakan kegiatan pendidikan dan pelatihan kader partai PKS yang harus diselenggarakan oleh pengurus partai PKS dalam setiap priodesasi kepengurusannya. Kegiatan ini dibagi menjadi beberapa level, yaitu; Sekolah Kepemimpinan Partai (SKP) 1 dan 2 diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Pusat (DPP), Sekolah Kepemimpinan Partai (SKP) 3 diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Wilayah (DPW) dan Sekolah Kepemimpinan Partai (SKP) 4 diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Berdasarkan keterangan bapak Sabiqin (ketua bidang kaderisasi DPW PKS Jawa Barat) Dewan Pengurus Wilayah PKS Jawa Barat telah melaksanakan kegiatan sekolah kepemimpinan partai (SKP) yaitu tepatnya pada hari jum'at-minggu, tanggal 25-27 November 2016 yang bertempat di Mason Pine Hotel, Kota Baru Parahyangan, Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Kegiatan SKP tersebut dibuka bertepatan dengan hari Guru Nasional (wawancara pada tanggal 12 Juni 2017 dikantor DPRD Jawa Barat). Sekolah Kepemimpinan Partai (SKP) yang diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKS Jawa Barat tersebut di ikuti oleh para ketua bidang DPW PKS Jawa Barat, ketua umum Dewan Pengurus Daerah (DPD) PKS se-Jawa Barat, ketua bidang kaderisasi serta ketua bidang pengembangan SDM dan lembaga profesi se-Jawa Barat.

Kegiatan ini diselenggarakan bertujuan untuk meningkatkan kapasitas, kapabilitas dan integritas para kader, pengurus dan tokoh PKS sehingga mereka mampu melaksanakan amanahnya dengan baik, dan lahirnya calon pemimpin yang dapat membawa perubahan terhadap pembangunan umat dan bangsa berdasarkan nilai-nilai ajaran agama Islam yang selama ini menjadi dasar perjuangan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Pemimpin yang bersih, profesional, adil dan mensejahterakan rakyat serta berkembangnya ajaran agama Islam dalam kehidupan masyarakat dan politik merupakan sesuatu yang dicita-citakan partai PKS sejak di dirikannya sampai detik ini.

Partai PKS sejak didirikannya telah berkomitmen untuk menjadi organisasi politik yang memperjuangkan nilai-nilai ajaran Islam dan mencentak kadernya menjadi pemimpin-pemimpin untuk umat dan bangsa yang dapat dipercaya masyarakat, serta bertanggungjawab atas terwujudnya masyarakat madani yang adil, sejahtera dan bermartabat yang diridhai Allah subhanahu wata'ala dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kemenangan Ahmad Heryawan dipemilihan umum gubernur Jawa Barat periode 2008-2013 dan periode 2013-2018 serta terpilihnya beberapa anggota DPR RI atau DPRD dari kader partai PKS DPW Jawa Barat serta kepala daerah lainnya di wilayah Jawa Barat (arsip bidang pemenangan pemilu dan pemilukada DPW PKS Jawa Barat) menunjukkan adanya kepercayaan dari kalangan masyarakat. Selain itu juga, terpilihnya tokoh-tokoh partai PKS untuk membantu kabinet kepresidenan menunjukkan kepercayaan terhadap kualitas kader PKS tidak hanya datang dari masyarakat tetapi juga datang dari pejabat kenegaraan.

## **PENUTUP**

Perencanaan (*planning*) merupakan starting point dari aktifitas manajerial. Bagaimanapun sempurnanya suatu aktifitas manajemen tetap membutuhkan sebuah perencanaan, karena perencanaan merupakan langkah awal bagi sebuah kegiatan dalam bentuk memikirkan hal-hal yang terkait agar memperoleh hasil yang optimal.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merupakan salah satu organisasi politik Islam yang memiliki misi atau tujuan dakwah, maka untuk mencapai tujuan tersebut dibutuhkan perencanaan-perencanaan organisasi sebagai langkah untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Berdasarkan hasil penelitian yang berkaitan dengan Perencanaan Dakwah Partai Politik Islam, yang dilakukan Dewan Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera (DPW PKS) Jawa Barat meliputi; *Pertama*, Perencanaan Partai PKS sebagai organisasi politik dalam mengusung Islam sebagai orientasi politik telah menjadi perhatian khusus kader-kader PKS. Oleh karena itu Partai PKS telah membuat perencanaan tersebut dengan proses rapat kerja kader dan pengurus DPW PKS Jawa Barat. Adapun tujuan dilaksanakannya rapat kerja wilayah kader dan pengurus DPW PKS Jawa Barat ini meliputi; *Pertama*, tujuan Primer yaitu suatu usaha kegiatan bersama untuk mengaktualisasikan nilai-nilai ajaran Islam

dalam bentuk amar ma'ruf nahi munkar dan amal shaleh dalam kehidupan sehari-hari, baik secara pribadi kader, keluarga, dan masyarakat, sehingga mewujudkan umat yang baik, sejahtera lahir dan batin serta bahagia di dunia terlebih di akhirat. Kedua, tujuan skunder yaitu usaha bersama dalam menanamkan keyakinan, menumbuhkan sikap dan membina perilaku umat dengan cara lisan, dan perbuatan menurut nilai-nilai ajaran Islam dan untuk dihayati serta diamalkan dalam kehidupan, sehingga menjadi umat yang baik, sejahtera lahir dan batin, serta bahagia di dunia terlebih di akhirat. *Kedua*, Perencanaan Partai PKS sebagai organisasi dakwah dalam melakukan amar ma'ruf nahi munkar yang dilakukan DPW PKS Jawa Barat direalisasikan dengan empat orbit dakwah Partai PKS yaitu; Mihwar At-tanzimi, Mihwar Sya'bi, Mihwar Muasasi dan Mihwar Daulah. Keempat orbit dakwah PKS ini menjadi langkah untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar dan menjadi strategi perencanaan gerakan dakwah Partai PKS, baik melalui gerakan dakwah kultural (mihwar tanzimi dan mihwar sya'bi) maupun gerakan dakwah struktural (mihwar muasasi dan mihwar daulah). Untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar DPW PKS Jawa Barat membuat perencanaan dalam sebuah program misalnya, mendirikan rumah keluarga Indonesia (RKI), gerakan memakmurkan masjid, melaksanakan buka puasa bersama masyarakat dan memberikan santunan anak yatim. Selain itu juga DPW PKS Jawa Barat mempunyai masyarakat binaan dimasing-masing tempat tinggal kader Partai PKS. Program yang sering dilakukan adalah kajian dan pendidikan Islam dimajlis-majlis, pelayanan kesehatan, dan pembinaan kemandirian usaha. *Ketiga*, Perencanaan Partai PKS sebagai organisasi kader dalam menghasilkan calon pemimpin umat dan bangsa. Perencanaan ini direalisasikan dengan rekrutmen, pendidikan dan pelatihan kader atau pengurus DPW PKS Jawa Barat dengan program training orientasi partai (TOP) dan sekolah kepemimpinan partai (SKP). Program ini merupakan proses penggemblengan kader atau pengurus Partai PKS untuk menyiapkan dan menumbuhkan pribadi-pribadi pemimpin yang mengerti dan bertanggungjawab atas terwujudnya kesejahteraan serta keadilan masyarakat.

Perencanaan dakwah yang telah dirumuskan oleh DPW PKS Jawa Barat diatas merupakan upaya untuk merealisasikan komitmen Partai PKS sebagai partai Islam yang mengemban misi dakwah sejak di dirikannya. Oleh karena itu, Islam menjadi ideologi partai PKS dan Islam menjadi tujuan akhir dari partai.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di DPW PKS Jawa Barat tentang perencanaan dakwah partai politik Islam, maka ada beberapa saran yang perlu diperhatikan baik untuk lembaga yang diteliti (PKS) maupun untuk penelitian selanjutnya.

Pertama, Partai PKS sebagai organisasi politik yang mempunyai misi dakwah dalam rangka upaya mengembangkan nilai-nilai ke-Islaman baik dalam kehidupan masyarakat maupun dikancah politik (parlemen dan birokrasi) harus mendorong kadernya untuk melaksanakan secara nyata, jangan sampai hanya menjadi sebatas wacana politik dari perencanaan yang telah ditentukan. Selain itu juga kader partai PKS yang telah dipercaya masyarakat harus benar-benar



menjalankan tanggungjawabnya tersebut dengan baik dan bijak, agar tumbuh kepercayaan masyarakat kepada partai Islam khususnya Partai PKS.

Kedua, Penelitian ini sangat menarik untuk dilakukan, sebab masih banyak sisi manajemen partai PKS lainnya yang harus diteliti, upaya menjadi organisasi politik Islam yang professional dan bersih. Selain salah satu penelitian juga merupakan proses atau upaya kontrol terhadap pemerintah melalui lembaga partai. Oleh karena itu, penelitian ini berharap dapat dilanjutkan oleh peneliti selanjutnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alawi, R. M. (2013). *Penggerakan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam Upaya Mengembangkan Dakwah Islam*. Skripsi, Jurusan Manajemen Dakwah, UIN Sunan Gunung Djati, Bandung.
- Anugrah, D. (2011). Marketing Politik: Urgensi dan Posisinya dalam Komunikasi Politik. *Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies*, 5(2), 575 – 598.
- Bems. (2013). *Penyebaran Islam di Indonesia*, di akses 10 Oktober 2017, dari <http://bemsjocker.blogspot.co.id/penyebaran-islam-di-indonesia>.
- Budiardjo, M. (1991). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia
- Depag RI. (2002). *Alquran dan Terjemah*. Surabaya: Al-Hidayah
- Hasibuan, S.P. M. (2011). *Manajemen; Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Jakarta: Bumi Aksara
- Media, W. (2017). *Partai Keadilan Sejahtera*, di akses 10 Oktober 2017, dari [https://id.wikipedia.org/Partai\\_Keadilan\\_Sejahtera](https://id.wikipedia.org/Partai_Keadilan_Sejahtera).
- Munir, M., & Ilahi, W. (2006). *Manajemen Dakwah*. Jakarta: Kencana.
- Sukayat, T. (2015). *Ilmu Dakwah; Perspektif Filsafat Mabadi' Ayyarab*. Bandung: Remaja Rosdakarya